

# Miskonsepsi Feminisme sebagai Pemicu *Toxic Masculinity*: Rekonstruksi Relasi Gender dalam Perspektif Kesetaraan

Arya Maulana Wiarnata<sup>1</sup>, Nyoman Tania Nesa<sup>2</sup>, Sheila Nasywa Razani<sup>3</sup>,  
Naila Azzahra Amelia Putri<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : [arya.maulana.wiarnata.2006@gmail.com](mailto:arya.maulana.wiarnata.2006@gmail.com)<sup>1</sup>, [tanianesa188@gmail.com](mailto:tanianesa188@gmail.com)<sup>2</sup>,

[sheilanasywarazani@gmail.com](mailto:sheilanasywarazani@gmail.com)<sup>3</sup>, [nailaputri0321@gmail.com](mailto:nailaputri0321@gmail.com)<sup>4</sup>, [ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

## Article Info

### Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted June 11, 2026

### Keywords:

Feminisme, Misconceptions,  
Toxic Masculinity.

## ABSTRACT

*Feminism is a movement aimed at achieving equality in rights, opportunities, and treatment between men and women. However, in modern social life, feminism is often misunderstood as an effort to place women above men. This misconception gives rise to various negative reactions that can exacerbate toxic masculinity, a pattern of attitudes and behaviors that demands men to always be strong, dominant, and suppress emotional expression in order to maintain their masculine identity. This article aims to analyze the forms of societal misconceptions regarding feminism, examine their impact on the emergence of toxic masculinity, and identify efforts that can be undertaken to foster healthy and equitable gender relations. The method employed is qualitative research using a literature review approach through the analysis of various journals, books, the internet, and relevant scientific sources. The findings indicate that misconceptions about feminism are largely influenced by stereotypes, patriarchal culture, and inaccurate representations in the media and digital spaces. These misunderstandings can lead to resistance toward the value of gender equality and encourage some men to excessively cling to traditional masculinity, which in turn gives rise to toxic masculinity. To address these issues, education on the concept of feminism, improved gender literacy, and reduction of gender stereotypes. As a result, healthier, more equal, and mutually respectful gender relations can be achieved.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted June 11, 2026

### Kata Kunci:

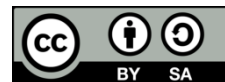
Feminisme, Miskonsepsi, *Toxic Masculinity*.

## ABSTRAK

Feminisme merupakan gerakan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kehidupan sosial modern, feminisme seringkali dipahami secara keliru sebagai upaya untuk menempatkan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Miskonsepsi tersebut memunculkan berbagai respons negatif yang dapat meningkatkan perilaku *toxic masculinity*, yaitu pola sikap dan perilaku yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, dominan, serta menekan ekspresi emosi demi mempertahankan identitas maskulinnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk miskonsepsi masyarakat terhadap feminisme, mengkaji dampaknya terhadap munculnya *toxic masculinity*, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk membangun relasi gender yang sehat dan setara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai jurnal, buku, internet, dan

sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa miskonsepsi feminisme banyak dipengaruhi oleh stereotip, budaya patriarki, serta representasi yang keliru di media dan ruang digital. Kesalahpahaman tersebut dapat menimbulkan resistensi terhadap nilai kesetaraan gender dan mendorong sebagian laki-laki untuk mempertahankan maskulinitas tradisional secara berlebihan, yang kemudian memunculkan perilaku *toxic masculinity*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan edukasi mengenai konsep feminisme, peningkatan literasi gender, serta pengurangan stereotip gender. Dengan demikian, relasi gender yang lebih sehat, setara, dan saling menghormati dapat terwujud.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

#### **Corresponding Author:**

Arya Maulana Wiarnata

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : [arya.maulana.wiarnata.2006@gmail.com](mailto:arya.maulana.wiarnata.2006@gmail.com)<sup>1</sup>

---

## **PENDAHULUAN**

Kesetaraan gender adalah suatu prinsip dasar pada keadilan sosial yang mengakui bahwa seluruh individu, tanpa membedakan jenis kelamin, mempunyai hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama di seluruh aspek kehidupan. Maksud dari kesetaraan gender yaitu hak dan kesempatan laki-laki dan perempuan wajib untuk diakui serta diberi kesempatan yang setara untuk berkembang, bukan berarti laki-laki dan perempuan menjadi sama dalam seluruh hal. Pemahaman mengenai kesetaraan gender mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkelanjutan, inklusif, serta adil. Salah satu dampak utama dari pemahaman kesetaraan gender yaitu terwujudnya pola pikir kritis mengenai konstruksi sosial yang bersifat patriarkis. Pada masyarakat yang sudah dibentuk oleh norma-norma yang kaku, pendidikan perihal kesetaraan gender bisa menjadi instrumen untuk mengurai gagasan yang membatasi potensi individu menurut jenis kelamin. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui pandangan jika laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan dapat dikikis melalui pengertian bahwa kompetensi tidak berdasarkan gender, namun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas yang dimiliki oleh seseorang (Hidayah, 2025).

Salah satu gerakan yang paling konsisten memperjuangkan kesetaraan gender adalah feminisme. Feminisme secara hakiki merupakan gerakan sosial, politik, dan ideologis yang bertujuan mengakhiri penindasan berbasis gender serta menciptakan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di seluruh dimensi kehidupan (Syayekti, 2023). Namun demikian, dalam praktik sosial, feminisme kerap dipahami secara keliru oleh sebagian masyarakat. Alih-alih dipandang sebagai gerakan kesetaraan, feminisme sering dituduh sebagai gerakan yang ingin menempatkan perempuan di atas laki-laki, bahkan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Kesalahpahaman ini tidak lahir dari ruang yang kompleks dari kombinasi antara stereotip sosial yang mengakar, representasi media yang tidak berimbang, serta minimnya literasi gender di Masyarakat (Hermawan, & Hidayah, 2023).

Dinamika ini semakin kompleks di era digital. Media sosial mulai dari Instagram, TikTok, hingga Twitter atau X telah mengubah cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan wacana gender. Di satu sisi, platform digital membuka ruang baru bagi aktivisme feminis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempercepat penggalan

solidaritas, serta membangun kesadaran publik tentang isu-isu ketidaksetaraan. Di sisi lain, kecepatan arus informasi yang tidak selalu disertai literasi kritis justru menjadi tempat bagi penyebaran kesalahpahaman tersebut. Konten-konten yang membahas feminisme menjadi narasi kebencian terhadap laki-laki atau yang membahas isu gender dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal menyebar luas tanpa verifikasi memadai (Novalina, dkk 2021). Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten pemicu reaksi emosional turut memperparah polarisasi wacana gender di ruang digital.

Media (media sosial dan media massa) mempunyai kontribusi yang penting dalam mewujudkan serta mengubah pola pikir masyarakat. Media berspektif gender merupakan kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan, mempermasalahkan, serta menggugat terus menerus mengenai terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, selain itu juga memiliki tujuan untuk mengedarkan ide-ide yang berhubungan dengan kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki (Syayekti, 2023). Platform digital membantu menyebarkan perspektif alternatif tentang peran gender sekaligus mempercepat penyebaran stereotip dan diskusi yang menyederhanakan atau mengubah arti kesetaraan. Di tengah dinamika ini muncul dua fenomena yang saling terkait. Pertama adalah feminisme yang sering dianggap sebagai upaya menyingkirkan laki-laki atau mencari keunggulan perempuan. Lalu kedua adalah ekspresi buruk laki-laki yang semakin meningkat, baik di ruang publik maupun privat. Ekspresi ini meningkatkan norma agresif, penekanan emosional, dan praktik dominasi yang berbahaya bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Kedua fenomena tersebut menegaskan satu masalah utama, yaitu adanya kesenjangan antara pemahaman ideal tentang kesetaraan gender dan realitas sosial, yang tetap didominasi oleh standar patriarkis.

Media, baik media massa maupun media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah cara orang berpikir. Media dengan perspektif gender menginformasikan, mengkritik, dan mengadvokasi peristiwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga berusaha menyebarkan ide-ide tentang kesetaraan dan keadilan gender sehingga wacana publik menjadi lebih reflektif dan akomodatif terhadap berbagai pengalaman yang berkaitan dengan gender. Media, bagaimanapun, dapat menjadi platform yang memperkuat miskonsepsi feminisme dan normalisasi pria berbahaya jika mereka tidak berhati-hati atau terjebak dalam simplifikasi. Hal ini akan semakin memperlebar jarak antara realitas sosial dan ideal kesetaraan.

Di tengah dinamika tersebut, muncul dua fenomena yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, kesalahpahaman terhadap feminisme yang kian meluas di ruang publik maupun digital. Kedua, meningkatnya ekspresi *toxic masculinity* sebagai respons atas persepsi ancaman terhadap identitas maskulin. *Toxic masculinity* merujuk pada pola sikap dan perilaku yang menuntut laki-laki untuk selalu tampil kuat, dominan, dan tidak emosional demi mempertahankan standar maskulinitas tradisional yang sesungguhnya bersifat konstruktif dan tidak alamiah. Ketika feminisme dipersepsi secara keliru sebagai ancaman bagi eksistensi laki-laki, sebagian laki-laki merespons dengan semakin mengukuhkan norma-norma maskulinitas yang kaku dan berlebihan. Pola ini terekspresi dalam berbagai bentuk, mulai dari ujaran kebencian berbasis gender di media sosial, resistensi terhadap diskusi kesetaraan, hingga normalisasi perilaku dominatif dalam relasi interpersonal (Kartika & Iqbal, 2023)

Persoalan mendasar yang mengemuka dari dua fenomena di atas adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara pemahaman ideal tentang kesetaraan gender dan realitas sosial yang masih didominasi oleh standar patriarkis. Idealnya, wacana kesetaraan gender termasuk feminisme seharusnya diterima sebagai upaya kolektif untuk membebaskan semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, dari belenggu konstruksi sosial yang membatasi

potensi mereka. Namun kenyataannya, pemahaman yang setengah-setengah, representasi yang distorsif, serta kurangnya ruang dialog yang konstruktif menciptakan polarisasi antara kelompok pendukung dan penolak nilai kesetaraan. Kondisi ini tidak hanya menghambat kemajuan relasi gender yang sehat, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang rentan terhadap konflik berbasis gender, baik di ruang publik maupun di ranah privat.

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya kajian yang secara sistematis mengidentifikasi bentuk-bentuk miskonsepsi terhadap feminisme, menelusuri faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis kaitannya dengan kemunculan *toxic masculinity* dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan harapan dapat berkontribusi pada upaya membangun relasi gender yang lebih sehat, setara, dan saling menghormati.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah analisis mendalam terkait fenomena sosial yang kompleks yakni miskonsepsi terhadap feminisme dan hubungannya dengan kemunculan *toxic masculinity*. Fenomena sosial ini memerlukan pemahaman konseptual dan teoritis yang berbasis pada berbagai sumber literatur. Sumber data ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti artikel jurnal, buku, serta website berita yang relevan untuk memperoleh bahan pembahasan terkait feminisme kesetaraan gender, maskulinitas, serta relasi gender dalam konteks sosial dan digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyeleksi dari sumber sumber tersebut melalui kata kunci yang relevan untuk kemudian dianalisis secara kritis.

Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode *content analysis* yang bersifat deskriptif-interpretatif. Proses analisisnya meliputi reduksi data dan penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dengan memilih serta memilih berbagai laporan dan informasi terkait penelitian seperti miskonsepsi feminisme, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap *toxic masculinity*. Selanjutnya disajikan narasi penggambaran relasi kausalitas antara kedua fenomena itu untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang bisa diusahakan untuk membangun relasi gender yang sehat dan setara. Penarikan kesimpulan menjadi langkah terakhir yang berdasar pada sintesis temuan berbagai literatur sehingga diperoleh pemahaman komprehensif dan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap dinamika sosial yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Kesetaraan Gender dan Dinamika Sosial di Era Digital

Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh hak, kesempatan, akses, dan perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bukan penyamaan secara mutlak, melainkan pengakuan bahwa keduanya memiliki martabat yang sama sebagai manusia. Penting untuk dibedakan bahwa jenis kelamin bersifat biologis dan kodrati, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan. Peran seperti "laki-laki harus kuat" atau "perempuan harus lembut" bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil warisan norma sosial yang terus direproduksi lintas generasi. Oleh karena itu, konsep gender bersifat relatif dan dapat berubah sesuai ruang dan waktu apa yang dianggap maskulin atau feminin di satu masyarakat belum tentu berlaku di masyarakat lain. Feminisme dan sosiologi modern menegaskan bahwa ketimpangan gender lahir dari struktur sosial dan budaya patriarki, bukan dari faktor biologis semata (Syamsiah).

Di era digital, dinamika gender semakin kompleks seiring dengan meluasnya pengaruh

media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna sosial yang turut membentuk persepsi masyarakat mengenai gender. Di satu sisi, media sosial dapat memperkuat stereotip melalui standar kecantikan atau citra maskulinitas; di sisi lain, ia juga menjadi arena perjuangan kesetaraan gender melalui kampanye, edukasi, dan gerakan digital. Era digital pun melahirkan *living culture* budaya hidup yang terus bernegosiasi dan mentransformasi nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, inklusivitas, dan keberagaman. Namun demikian, ruang digital juga menghadirkan tantangan nyata berupa *cyber sexism*, *body shaming*, misogini digital, hingga penyebaran stereotip melalui algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak bersifat netral ia ikut membentuk pola pikir, budaya, dan relasi sosial masyarakat modern, sehingga budaya digital menjadi arena baru tempat nilai-nilai kesetaraan gender diperdebatkan dan diperjuangkan secara global (Sitinjak, 2023).

## B. Miskonsepsi Feminisme dalam Kehidupan Sosial Modern

### 1. Konsep Feminisme Secara Akademik

Secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa Latin *femina* yang berarti perempuan, dan istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an sebagai acuan terhadap teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Rizkiyah & Trisakti, 2022). Secara historis, gerakan ini melewati tiga gelombang: gelombang pertama memperjuangkan hak politik dan pendidikan; gelombang kedua menyoroti ketimpangan dalam ranah kerja, keluarga, dan hak reproduksi; sementara gelombang ketiga memperluas cakupannya ke isu globalisasi dan keberagaman identitas. Tokoh seperti Mary Wollstonecraft meletakkan fondasi argumen bahwa kesetaraan kemampuan antara perempuan dan laki-laki hanya dapat terwujud melalui akses pendidikan yang setara (Ilaa Thurfa Dhiyaa, 2021). Perlu ditegaskan bahwa feminisme sering disalahpahami sebagai gerakan yang mengunggulkan perempuan atas laki-laki. Pemahaman demikian keliru secara konseptual. Karena inti dari feminisme adalah menegakkan keadilan universal membebaskan seluruh individu dari penindasan berbasis kelas, kasta, maupun jenis kelamin (BENDAR, 2020). Dalam perkembangannya, gerakan ini sering disalahartikan sebagai upaya menomorsatukan posisi perempuan, padahal pada hakikatnya feminisme hadir untuk memperbaiki ketimpangan gender dan bukan untuk memperkuat satu jenis gender tertentu (Octaviani et al., 2022). Kesalahpahaman ini perlu diluruskan mengingat perjuangan feminisme sesungguhnya bersifat inklusif, tidak hanya berpihak pada perempuan, tetapi juga membebaskan laki-laki dari tekanan standar maskulinitas yang dipaksakan oleh masyarakat. Pandangan bahwa pria harus terlihat selalu maskulin justru menjadi beban tersendiri bagi setiap individu, sehingga feminisme hadir untuk menghapus standar ganda yang merugikan semua pihak (Octaviani et al., 2022).

Feminisme merupakan gerakan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang bebas dari penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender melalui penghapusan struktur patriarki serta pemenuhan hak yang setara bagi setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki. Sejalan dengan pemikiran Simone de Beauvoir, feminisme menegaskan bahwa perbedaan biologis tidak dapat dijadikan dasar pembatasan hak atas pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial. Sebagai kritik terhadap ketimpangan struktural, feminisme menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, kekerasan berbasis gender, dan *victim blaming*. Dalam konteks Indonesia, perjuangan feminisme telah berkembang sejak era kolonial melalui tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika, hingga kini bertransformasi melalui ruang digital untuk mengadvokasi kesetaraan gender, perlindungan korban kekerasan, dan penghapusan diskriminasi. Komitmen tersebut juga memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui UU

Nomor 7 Tahun 1984, serta kebijakan Pengarusutamaan Gender. Dengan demikian, feminisme merupakan bagian dari perjuangan Hak Asasi Manusia yang berorientasi pada terciptanya kehidupan yang adil, setara, dan manusiawi bagi seluruh gender.

## 2. Teori yang Relevan

### a. Teori Efektivitas Hukum: Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencakup sikap, nilai, harapan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan (Faturachman & dkk., 2025). Dalam konteks gender, budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Akibatnya, berbagai bentuk ketimpangan gender sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa feminisme kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, padahal pada dasarnya merupakan upaya memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia (Irianto, 2011).

### b. Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Teori Hukum Feminis muncul sebagai kritik terhadap hukum konvensional yang dinilai belum mampu mengakomodasi pengalaman dan ketidakadilan yang dialami perempuan. MacKinnon (1989) berpendapat bahwa hukum tidak sepenuhnya netral karena sering merefleksikan dominasi laki-laki. Smart (1989) menambahkan bahwa hukum juga berperan dalam membentuk konstruksi gender melalui penentuan standar tentang perempuan dan laki-laki. Sementara itu, Fineman (2008) melalui *vulnerability theory* menekankan pentingnya pengakuan terhadap kerentanan manusia sebagai dasar perlindungan hukum. Teori ini menunjukkan bahwa subordinasi perempuan sering dinormalisasi melalui sistem sosial dan hukum, sehingga stigma terhadap feminisme dan normalisasi *toxic masculinity* tidak dapat dipisahkan dari struktur yang menopangnya.

### c. Teori Feminisme Kultural: Carol Gilligan

Carol Gilligan dalam *In a Different Voice* (1982) mengkritik teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg yang dianggap berpusat pada pengalaman laki-laki. Menurut Gilligan, standar moral yang dianggap universal sebenarnya dibangun dari perspektif maskulin, sedangkan nilai-nilai seperti empati, relasi, dan kepedulian (*ethics of care*) yang sering diasosiasikan dengan perempuan justru dipandang kurang bernilai (Josselson, 2022). Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi gender membentuk persepsi terhadap feminisme. Dominasi standar maskulin dalam masyarakat menyebabkan tuntutan kesetaraan sering dianggap menyimpang dari peran perempuan yang dianggap ideal. Oleh karena itu, miskonsepsi terhadap feminisme tidak hanya bersumber dari kurangnya informasi, tetapi juga dari sistem nilai yang telah lama tertanam dalam masyarakat.

## 3. Bentuk Miskonsepsi Feminisme

Di tengah deras arus informasi, feminisme menjadi salah satu konsep yang paling sering dikutip sekaligus paling sering disalahartikan baik oleh mereka yang menolaknya maupun oleh sebagian yang mengaku mendukungnya. Miskonsepsi terhadap feminisme bukan sekadar kesalahan pemahaman individual, melainkan sebuah fenomena sosial yang terbentuk melalui proses panjang reduksi, distorsi, dan simplifikasi terhadap gagasan yang sesungguhnya beragam dan kompleks. Salah satu miskonsepsi paling dominan yang beredar di masyarakat adalah anggapan bahwa feminisme merupakan gerakan anti laki-laki (Ageng, 2026). Persepsi ini muncul dalam berbagai perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial, dimana feminisme sering direpresentasikan secara sederhana dan dilekatkan dengan citra yang negatif. Akibatnya, istilah feminisme dipahami secara reduktif dan terlepas dari konsep akademiknya

yang secara jelas tidak mengarahkan feminisme untuk memusuhi laki-laki sebagai individu, melainkan untuk dipahami sebagai kritik terhadap relasi kuasa berbasis gender, bukan sebagai ekspresi emosional anti laki-laki. Kesalahpahaman terhadap feminisme muncul ketika masyarakat lebih mengenal citra karikaturalnya daripada isi teoretisnya. Miskonsepsi kedua yang tak kalah mengakar adalah pandangan bahwa feminisme bertujuan membalikkan tatanan sosial yang menggantikan dominasi laki-laki dengan dominasi perempuan (Susanti et al., 2024). Pandangan ini jelas keliru. Dalam realitanya, tidak semua laki-laki mendominasi, dan feminisme justru mengakui kompleksitas relasi kuasa tersebut. Feminisme tidak hadir untuk membalikkan hirarki gender, melainkan penghapusan hierarki itu sendiri. Tujuan utamanya adalah membangun relasi yang setara dan adil antara semua gender, bukan menciptakan hierarki baru yang hanya membalikkan posisi lama.

Miskonsepsi ketiga adalah penyamaan feminisme dengan gagasan kebebasan tanpa batas, terutama dalam domain seksualitas dan moralitas (Rendanody, 2019). Pandangan ini mengaburkan batas antara feminisme sebagai gerakan hak asasi dengan agenda-agenda lain yang berbeda. Miskonsepsi feminisme yang dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap munculnya *toxic masculinity* melalui mekanisme persepsi ancaman terhadap norma gender yang sudah mapan, sehingga sebagian laki-laki merespons secara defensif dengan menegaskan kembali pola maskulinitas yang dominan, agresif, dan eksklusif. Miskonsepsi keempat adalah yang paling struktural, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat modern memperoleh pemahaman tentang feminisme. Media sosial, dengan segala algoritma yang cenderung memperkuat konten yang bersifat provokatif dan emosional dibandingkan bersifat edukatif (Rahaayu, 2021). Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang feminisme terbentuk secara parsial, hanya berdasarkan potongan-potongan narasi yang tidak utuh. Feminisme yang dipahami secara parsial melalui media sosial cenderung mengalami simplifikasi dan distorsi sehingga memunculkan persepsi ancaman terhadap identitas gender tradisional. Persepsi yang terfragmentasi ini dapat memicu reaksi defensif pada sebagian laki-laki berupa penegasan kembali norma maskulinitas yang kaku, dominan, dan agresif sebagai bentuk kompensasi psikososial, yang dalam literatur gender dikaitkan dengan *toxic masculinity*.

#### 4. Faktor Penyebab Miskonsepsi feminisme

Miskonsepsi terhadap feminisme yang begitu meluas di masyarakat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Melainkan implikasi dari interaksi kompleks antara faktor historis, kultural, dan institusional, dan teknologi yang secara kolektif membentuk cara pandang publik terhadap gerakan ini (Tong, R., & Botts, 2018). Adanya miskonsepsi terkait feminisme ini tidak terjadi begitu saja, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakanginya, terutama di Indonesia. Miskonsepsi terhadap feminisme salah satunya dipengaruhi oleh dominasi narasi feminisme Barat dalam wacana global, sehingga feminisme sering dipahami secara tunggal berdasarkan konteks sosial Amerika dan Eropa (Wibowo, 2022). Akibatnya, feminisme dipandang asing dan tidak sesuai dengan realitas budaya lokal. Benturan antara nilai global dan tradisi masyarakat juga memperkuat miskonsepsi tersebut, terutama ketika kesetaraan gender dipahami sebagai ajakan meninggalkan peran domestik yang dalam banyak budaya justru dianggap sebagai sumber identitas dan kekuatan (Ageng, 2026). Akibatnya, feminisme sering dicap sebagai gerakan yang merusak tatanan sosial, padahal penilaian tersebut lahir dari pemahaman yang tidak menyeluruh.

Budaya patriarki yang telah mengakar juga menjadi faktor penting dalam munculnya kesalahpahaman terhadap feminisme. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sejak kecil dikondisikan untuk menerima posisi subordinat sebagai sesuatu yang wajar dan kodrati, sehingga feminisme dipandang bukan sebagai perjuangan hak, melainkan sebagai bentuk

pemberontakan terhadap norma sosial (Ageng, 2026). Perempuan yang memperjuangkan kesetaraan pun kerap diberi stigma negatif, seperti dianggap melawan budaya atau keluar dari peran yang seharusnya. Di sisi lain, politisasi tubuh dan identitas perempuan turut mengaburkan makna feminisme yang sebenarnya. Pengalaman perempuan Indonesia menunjukkan bagaimana tubuh dan pilihan perempuan sering dijadikan arena pertarungan ideologi dan kepentingan politik. Seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, perempuan yang tampil modern dan mandiri justru dipandang sebagai ancaman stabilitas negara. Ketika tubuh perempuan dijadikan arena pertarungan ideologi dan kepentingan kekuasaan, esensi perjuangan feminisme pun menjadi kabur (Khidlir, 2025). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai isu gender dan feminisme. Banyak orang memahami feminisme bukan melalui sumber yang kredibel, melainkan dari potongan informasi di media sosial, komentar provokatif, atau cerita yang telah kehilangan konteks aslinya. Akibatnya, pemahaman yang terbentuk menjadi dangkal dan mudah dipengaruhi oleh narasi yang menyesatkan.

### C. Dampak Miskonsepsi Feminisme terhadap Munculnya *Toxic Masculinity*

#### 1. Konsep *Toxic Masculinity*

*Toxic Masculinity* adalah konsep yang merujuk pada seperangkat norma, nilai, dan ekspektasi sosial tentang maskulinitas yang mendorong laki-laki untuk menunjukkan dominasi, menekan emosi, menghindari kerentanan, serta menganggap agresivitas sebagai ciri utama kejantanan. *Toxic masculinity* menjadi salah satu istilah yang sering digunakan dalam diskusi feminisme modern untuk menggambarkan perilaku laki-laki yang mengandung unsur seksisme atau dominasi terhadap perempuan (Harrington, 2021). Konsep ini tidak menganggap maskulinitas itu sendiri sebagai sesuatu yang buruk, melainkan mengkritik bentuk-bentuk maskulinitas yang dapat merugikan individu maupun lingkungan sosial.

Dalam praktiknya, *toxic masculinity* sering tercermin melalui anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis, harus selalu kuat secara fisik maupun mental, tidak boleh menunjukkan rasa takut, serta harus mampu mendominasi orang lain untuk dianggap ‘jantan’. Pola pikir tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesulitan mengekspresikan emosi, meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, perilaku kekerasan, perundungan, hingga diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas tradisional. Secara sosiologis, konsep ini berkembang dari kajian gender yang melihat bahwa konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dibentuk oleh budaya, keluarga, media, serta institusi sosial lainnya. Oleh karena itu, *toxic masculinity* dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang menempatkan laki-laki dalam tekanan untuk memenuhi standar maskulinitas tertentu, bukan sebagai karakter bawaan yang melekat pada semua laki-laki.

#### 2. Relasi Kausal antara Miskonsepsi Feminisme dan *Toxic Masculinity*

Resistensi sosial terhadap feminisme di Indonesia merupakan fenomena yang lahir dari akumulasi kesalahpahaman yang telah lama berakar dan direproduksi melalui berbagai institusi sosial, budaya, dan keagamaan. Feminisme merupakan gerakan yang sebenarnya bertujuan untuk mengkritik struktur sosial yang menghasilkan kesenjangan antar gender yang seringkali disalah pahami oleh sebagian masyarakat. Kesalahpahaman ini dibentuk dan dipertahankan oleh internalisasi nilai-nilai patriarki yang telah lama dinormalisasi dalam kehidupan sosial (Zidan et al., 2026). Miskonsepsi yang paling sering dijumpai adalah anggapan bahwa feminisme merupakan gerakan yang secara aktif menentang laki-laki atau berusaha menggantikan peran yang sebelumnya selalu dipegang oleh laki-laki menjadi dipegang oleh perempuan. Anggapan tersebut muncul dari kegiatan kampanye feminisme yang dilakukan di

ruang publik, namun dilakukan dengan cara yang dianggap berlebihan oleh sebagian laki-laki (Zidan et al., 2026). Sebagian besar respons negatif laki-laki muncul bukan sebagai penolakan terhadap feminisme, tetapi sebagai reaksi emosional terhadap kampanye di ruang publik yang ditafsirkan sebagai ancaman dari identitas maskulin dari laki-laki (Syafi'i, 2023).

Resistensi tersebut diperparah oleh konstruksi maskulinitas yang rigid dalam masyarakat. *Toxic Masculinity*, sebagai salah satu produk utama budaya patriarki yang telah membangun kebiasaan bahwa laki-laki harus selalu dominan, tidak boleh menunjukkan kelemahan, dan wajib mempertahankan perannya sebagai tulang punggung keluarga (Hermawan & Hidayah, 2023). Kemudian ketika feminisme menawarkan wacana baru, di mana laki-laki tidak harus selalu kuat dan tidak harus menjadi satu-satunya tulang punggung, wacana tersebut tidak diterima sebagai pembebasan, melainkan dimaknai sebagai ancaman terhadap identitas laki-laki yang telah terkonstruksi sejak lama (Syafi'i, 2023). Reaksi tersebut bukan berarti menolak secara mentah feminisme sebagai ideologi, tetapi lebih mencerminkan ketidaksiapan ketidaksiapan psikologis individu yang telah tersosialisasi dalam norma maskulinitas yang kaku untuk menerima pergeseran peran gender (Hermawan & Hidayah, 2023). Selain itu, fenomena resistensi ini juga diperburuk oleh lemahnya literasi gender di masyarakat. Rendahnya pemahaman konseptual tentang feminisme membuat diskusi di ruang publik menjadi cenderung bersifat emosional dan reaktif, yang menyebabkan feminisme lebih mudah dipahami sebagai simbol perlawanan terhadap laki-laki, dibandingkan sebagai kritik terhadap struktur sosial (Zidan et al., 2026).

Resistensi laki-laki terhadap feminisme kerap dibalut dengan argumen yang secara permukaan tampak logis, seperti perbedaan fisiologis antara laki-laki dan perempuan, atau legitimasi agama sebagai basis pembagian peran gender (Syafi'i, 2023). Penggunaan argumen biologis dan agama ini bukan sekadar ekspresi keyakinan, melainkan juga merupakan strategi diskursif untuk mempertahankan tatanan yang telah mapan dari kritik feminisme. Dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, moralitas keluarga, dan tafsir keagamaan, feminisme dengan mudah dicap sebagai gerakan yang bertentangan dengan identitas perempuan ideal sekaligus mengancam tatanan keluarga yang dianggap sakral (Zidan et al., 2026). Akibatnya, narasi bahwa "laki-laki sedang diserang" bukan hanya beredar di kalangan laki-laki, tetapi juga diadopsi oleh sebagian perempuan yang telah terinternalisasi nilai-nilai patriarki dan memandang feminisme sebagai ancaman terhadap norma sosial yang mereka yakini.

Resistensi terhadap feminisme tidak hanya menghasilkan penolakan terhadap gagasan kesetaraan gender, namun juga dapat memperkuat potensi maskulinitas toksik. Kondisi semacam ini dapat terjadi dikarenakan pada saat sebagian laki-laki memandang tuntutan kesetaraan gender sebagai ancaman terhadap posisi dominan yang selama ini melekat pada persepsi maskulinitas itu sendiri. Dalam perspektif *hegemonic masculinity*, terdapat sebuah bentuk maskulinitas yang dianggap sebagai ideal dan superior dibandingkan bentuk maskulinitas lainnya bahkan dibandingkan dengan perempuan. Posisi dominan itulah yang kemudian dipertahankan melalui berbagai praktik sosial yang menegaskan kekuasaan, otoritas, dan kontrol dari kaum laki-laki terhadap masyarakat (Connell & Messerschmidt, 2005).

Ketika feminisme hadir dengan kritik terhadap struktur patriarki dan ketimpangan gender, sebagian laki-laki merespons secara defensif karena menganggap perubahan tersebut dapat mengurangi *privilege* yang selama ini dimiliki. Reaksi defensif tersebut mendorong individu untuk semakin menegaskan karakteristik maskulin tradisional seperti dominasi, kontrol, dan superioritas terhadap perempuan. Sehingga dalam konteks ini, resistensi terhadap feminisme bukan hanya merupakan bentuk penolakan terhadap suatu gerakan sosial, tetapi juga

menjadi mekanisme untuk mempertahankan konstruksi maskulinitas yang telah lama mengakar dalam masyarakat.

Resistensi tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi maskulinitas toksik. Kupers juga menjelaskan bahwa maskulinitas toksik merupakan seperangkat norma yang menekankan dominasi, agresivitas, penolakan terhadap kerentanan emosional, serta kebutuhan untuk selalu menunjukkan kekuatan. Ketika laki-laki merasa identitasnya terancam oleh perubahan sosial yang dibawa oleh feminisme, karakteristik tersebut sering kali muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Akibatnya, sebagian laki-laki cenderung menunjukkan perilaku agresif dalam diskusi mengenai gender, meremehkan pengalaman perempuan, atau menolak pembagian peran yang lebih setara dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu, maskulinitas toksik juga tercermin dalam tuntutan agar laki-laki selalu tampil kuat dan tidak menunjukkan kelemahan. Menurut Kupers, norma tersebut menyebabkan laki-laki kesulitan mengekspresikan emosi secara sehat karena ekspresi emosional sering kali dipandang bertentangan dengan citra maskulin yang ideal. Oleh karena itu, ketika feminisme menawarkan konsep maskulinitas yang lebih ideal dan terbuka terhadap ekspresi emosional menurut mereka, sebagian laki-laki justru memaknainya sebagai ancaman terhadap identitas yang telah dibentuk oleh budaya patriarki (Kupers, 2005)

Resistensi terhadap feminisme dan maskulinitas toksik memiliki hubungan yang saling berkaitan. Miskonsepsi terhadap feminisme mendorong munculnya reaksi defensif dari sebagian laki-laki, sedangkan reaksi tersebut memperkuat praktik-praktik maskulinitas yang berorientasi pada dominasi dan kontrol. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi gender menjadi penting untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap feminisme sekaligus mendorong terbentuknya konstruksi maskulinitas yang lebih sehat dan setara

### 3. Manifestasi dalam Kehidupan Sosial dan Digital

Dalam konstruksi maskulinitas hegemonik, laki-laki sering diharapkan untuk tampil kuat, memiliki kendali, serta menunjukkan kekuasaan dalam berbagai situasi. Akibatnya, perilaku agresif kerap dipandang sebagai sesuatu yang normal dan bahkan dijadikan salah satu penanda kejantanan atau identitas maskulin. Agresivitas sering dipandang sebagai salah satu karakteristik yang menunjukkan maskulinitas pada laki-laki. Agresivitas dapat diartikan sebagai: a) kecenderungan yang telah menjadi kebiasaan untuk menunjukkan permusuhan; b) sikap menegaskan diri, menonjolkan diri, menuntut atau memaksakan kehendak, serta mengejar tujuan dengan penuh semangat; dan c) dominasi sosial atau kekuasaan sosial, terutama ketika diterapkan secara berlebihan (Fitri et al., 2016).

Menurut Sigmund Freud, perilaku agresif merupakan manifestasi dari insting kematian (*thanatos*) yang berfungsi menyalurkan energi destruktif guna menjaga keseimbangan dengan insting kehidupan (*eros*). Meskipun dapat dikendalikan, agresivitas tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena merupakan bagian dari sifat dasar manusia. Perilaku agresif terdiri atas empat bentuk, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan (*anger*), dan permusuhan (*hostility*). Agresi fisik ditunjukkan melalui tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain, sedangkan agresi verbal diwujudkan melalui ucapan yang menyerang atau merendahkan. Kemarahan merupakan kondisi emosional yang mencerminkan kesiapan individu untuk bertindak agresif, sementara permusuhan ditandai oleh perasaan benci, curiga, iri hati, serta pandangan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil.

Menurut Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears (2009), munculnya perilaku agresif memiliki hubungan yang erat dengan rasa marah yang dialami seseorang. Perasaan marah tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti adanya serangan atau perlakuan negatif dari orang lain, munculnya frustrasi akibat hambatan dalam mencapai tujuan,

keinginan untuk melakukan pembalasan atau balas dendam, serta situasi kompetisi yang mendorong individu untuk mempertahankan posisi atau mencapai kemenangan. Dengan demikian, perilaku agresif tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi psikologis dan sosial yang dialami individu (Yanizon & Sesriani, 2019).

Dalam konteks maskulinitas, terdapat istilah *alpha male* yang merujuk pada laki-laki yang memiliki karakter dominan, percaya diri, tegas, dan berjiwa pemimpin sehingga mampu memperoleh pengaruh atau kedudukan yang tinggi dalam lingkungan sosialnya. Sosok ini umumnya dipandang sebagai individu yang mampu mengendalikan situasi, mengambil keputusan dengan cepat, serta memimpin orang lain. Seiring perkembangannya, media massa dan media sosial semakin mempopulerkan konsep *alpha male* sebagai representasi laki-laki ideal yang kuat, mandiri, kompetitif, dan berotoritas, sehingga karakteristik tersebut kerap dijadikan ukuran keberhasilan maskulinitas dalam masyarakat.

Dalam kajian akademik, konsep *alpha male* sering dikaitkan dengan teori *hegemonic masculinity* yang dikemukakan oleh R. W. Connell. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat mengonstruksikan maskulinitas ideal sebagai sosok laki-laki yang kuat, dominan, rasional, dan berkuasa, sehingga menjadi standar yang mendukung dominasi laki-laki dalam struktur sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat *toxic masculinity* pada remaja laki-laki berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 82,58. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya internalisasi nilai-nilai maskulinitas hegemonik, seperti tuntutan untuk bersikap dominan, kuat secara emosional, dan menyembunyikan kerentanan diri. Selain dipengaruhi oleh tekanan sosial (*threat*), *toxic masculinity* juga berkembang melalui penghargaan sosial (*boost*) yang membuat perilaku maskulin tertentu dipandang sebagai simbol keberhasilan dan pencapaian diri. Oleh karena itu, internalisasi maskulinitas tidak hanya didorong oleh tekanan, tetapi juga oleh kebutuhan akan penerimaan sosial, afiliasi, dan pembentukan harga diri. Tingginya kecenderungan *toxic masculinity* juga menunjukkan peran penting keluarga dan lingkungan sosial dalam proses sosialisasi gender. Dalam perspektif *symbolic interactionism*, identitas maskulin terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara berulang sejak masa kanak-kanak. Proses ini turut diperkuat oleh media populer yang sering menampilkan dan menormalisasi figur laki-laki yang dominan serta menekan ekspresi emosionalnya (Adhani et al., 2026).

Dalam konstruksi *toxic masculinity*, perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri terhadap standar yang ditentukan laki-laki. Pola pikir ini dapat mendorong munculnya *victim blaming* terhadap perempuan ketika terjadi kekerasan atau pelecehan. *Victim blaming* merupakan sikap atau tindakan yang menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya, alih-alih menempatkan tanggung jawab pada pelaku atau penyebab utama kejadian tersebut. Fenomena ini sering ditemukan dalam berbagai kasus, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk kejahatan lainnya. *Victim blaming* dapat dipengaruhi oleh stereotip, mitos yang berkembang di masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis yang dialami korban. Selain itu, perilaku ini juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis untuk mengurangi rasa takut menjadi korban. Praktik *victim blaming* bersifat merugikan karena dapat menghambat korban dalam mencari bantuan, dukungan, maupun keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi praktik tersebut serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung korban (Shopiani et al., 2021).

Proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual sering kali menimbulkan reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap korban. Hal ini terlihat dari pertanyaan aparat penegak hukum yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*), termasuk mengungkit riwayat seksual dan latar belakang pribadi korban sebagai pertimbangan yang dapat meringankan

pelaku. Selain itu, proses pembuktian dan pemberian kesaksian sering kali memperburuk trauma psikologis yang dialami korban. Prosedur pengumpulan bukti juga dapat mengurangi privasi korban karena tubuhnya dijadikan bagian dari alat pembuktian dalam proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan masih belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban. Menurut Amin dan Nurkartiko (2023), situasi ini tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang melahirkan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual, bahkan dalam beberapa kasus penyelesaian perkara dihentikan melalui mekanisme perdamaian, seperti pernikahan antara pelaku dan korban. Senada dengan itu, Jonathan Doak (2008) menyatakan bahwa korban secara tidak langsung dapat mengalami reviktimisasi selama proses peradilan pidana.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat dipahami melalui konsep jenis kelamin (sex) dan gender (Tamburaka, 2012). Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis dan fungsi reproduksi, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membentuk atribut, peran, serta pembagian kerja yang dianggap maskulin atau feminin. Namun, pemahaman mengenai perbedaan keduanya masih sering keliru di masyarakat. Kesalahpahaman tersebut diperkuat oleh pelabelan sosial dan representasi media yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks budaya patriarki, perempuan sering ditempatkan pada ranah domestik, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan peran publik dan kepemimpinan (Sakina, 2017; Widodo et al., 2021). Kondisi ini berpotensi membatasi kebebasan dan hak perempuan dalam kehidupan sosial.

Media sosial sebagai bagian dari media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Kemudahan akses internet dan penggunaan gawai menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi yang banyak digunakan masyarakat. Berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu, sehingga berpengaruh besar dalam penyebaran informasi, pembentukan persepsi, serta konstruksi pandangan masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk gender (Maxmanroe, 2018; Widodo et al., 2021).

#### 4. Dampak Sosial

Relasi gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui konstruksi sosial mengenai peran, fungsi, dan kemampuan, sehingga bersifat dinamis serta terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat (Fujiati, 2014). Relasi gender yang ideal didasarkan pada prinsip kemitraan, saling menghormati, dan kesetaraan, di mana perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak dijadikan dasar untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi, melainkan untuk saling melengkapi dan bekerja sama sesuai kapasitas masing-masing. Feminisme bertujuan untuk mendorong terciptanya relasi gender yang lebih setara melalui penghapusan berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Prasetyo, 2025). Namun, saat ini banyak terjadi miskonsepsi terhadap feminisme. Miskonsepsi ini tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman mengenai tujuan utama gerakan kesetaraan gender, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketika feminisme dipahami secara keliru sebagai gerakan yang berupaya mengurangi atau menghapus peran laki-laki dalam kehidupan sosial, akibatnya, isu gender tidak lagi dipahami sebagai upaya membangun hubungan yang adil, melainkan sebagai persaingan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh posisi yang lebih dominan.

Di satu sisi, sebagian perempuan yang memahami feminisme secara keliru dapat mengembangkan pandangan bahwa laki-laki tidak lagi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Perspektif tersebut berpotensi melahirkan sikap antagonistik terhadap laki-laki dan menggeser makna feminisme dari perjuangan kesetaraan menjadi tuntutan superioritas. Di sisi lain, sebagian laki-laki memandang perkembangan tersebut sebagai

ancaman terhadap identitas dan peran sosial yang selama ini mereka miliki. Kondisi tersebut kemudian memunculkan respons defensif yang ditandai dengan upaya mempertahankan dominasi maskulin. Respons defensif tersebut sering kali termanifestasi dalam bentuk *toxic masculinity*, yaitu keyakinan bahwa laki-laki harus selalu kuat, dominan, rasional, dan menekan kerentanan emosional (Adrian, 2024). Akibatnya, ekspresi emosi seperti menangis atau mengungkapkan kesulitan hidup kerap dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga laki-laki terdorong untuk mempertahankan citra maskulin yang kaku meskipun dapat berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Padahal, maskulinitas merupakan konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk melalui proses sosialisasi, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, bukan sifat yang muncul secara alamiah (Maulida & Ahmadi, 2025).

Ketika kedua kelompok sama-sama berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai feminisme, relasi gender yang semula berlandaskan kemitraan berubah menjadi hubungan yang penuh prasangka dan pertahanan identitas. Laki-laki dan perempuan tidak lagi dipandang sebagai mitra sosial yang saling melengkapi, melainkan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan relasi gender dan menghambat terwujudnya hubungan sosial yang setara.

Selain memengaruhi relasi gender, miskonsepsi feminisme juga berpotensi menimbulkan konflik identitas antara laki-laki dan perempuan. Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan mengenai peran, kedudukan, dan ekspektasi gender dalam masyarakat. Ketika feminisme dipahami secara keliru, individu dapat mengalami kebingungan dalam memahami identitas dan posisi sosialnya. Selama ini, masyarakat membangun konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai sosok pemimpin dan pelindung, sementara perempuan diasosiasikan dengan peran pengasuhan dan ranah domestik (Humas, 2024). Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender mendorong konstruksi tersebut untuk dievaluasi kembali. Namun, apabila feminisme dimaknai sebagai upaya menghapus peran laki-laki atau mengunggulkan perempuan, perubahan tersebut justru dapat memicu ketegangan identitas dan resistensi terhadap kesetaraan gender.

Di satu sisi, pemahaman feminisme yang ekstrem dapat mendorong sebagian perempuan memandang kemandirian sebagai sesuatu yang harus dicapai tanpa keterlibatan laki-laki. Pandangan tersebut berpotensi menciptakan hubungan yang bersifat konfrontatif, alih-alih didasarkan pada kerja sama dan kemitraan. Di sisi lain, sebagian laki-laki memandang perubahan tersebut sebagai ancaman terhadap identitas maskulin yang selama ini dikaitkan dengan kekuatan dan kemandirian (Brahmana et al., 2019). Pergeseran peran gender dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi laki-laki dalam masyarakat, sehingga sebagian dari mereka merespons dengan menegaskan identitas maskulin melalui perilaku yang lebih dominan, agresif, atau defensif. Konflik identitas antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu dampak yang dapat muncul akibat miskonsepsi feminisme. Kondisi ini bukan disebabkan oleh tuntutan kesetaraan gender itu sendiri, melainkan oleh pemahaman yang keliru yang memandang kesetaraan sebagai perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, kedua pihak cenderung melihat satu sama lain sebagai ancaman terhadap identitasnya masing-masing, sehingga mempersempit ruang dialog, memperkuat prasangka antar gender, dan menciptakan polarisasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya hubungan sosial yang harmonis, setara, dan saling menghargai.

Miskonsepsi feminisme dan munculnya *toxic masculinity* dapat menurunkan kualitas relasi sosial yang setara. Padahal, relasi yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta pengakuan terhadap hak dan martabat setiap individu tanpa memandang gender. Kesalahpahaman terhadap feminisme sering membuat laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain sebagai pihak yang saling berlawanan, sehingga ruang

dialog berubah menjadi perdebatan yang dipenuhi stereotip dan generalisasi. Kondisi ini berpotensi menghambat kerja sama yang sehat dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

*Toxic masculinity* dapat memperkuat penolakan terhadap kerentanan, empati, dan komunikasi emosional yang penting dalam membangun hubungan sosial yang berkualitas. Akibatnya, relasi antar gender menjadi kurang harmonis dan sulit mencapai kesetaraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai feminisme dan kesetaraan gender diperlukan untuk mencegah polarisasi serta mendorong terbentuknya hubungan yang lebih sehat, inklusif, dan setara antara laki-laki dan perempuan.

#### **D. Urgensi Membangun Relasi Gender yang Sehat dan Setara**

Relasi gender yang sehat merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun atas prinsip kesetaraan, keadilan, saling menghormati, dan kerja sama. Relasi ini menempatkan setiap individu pada kedudukan yang setara tanpa menjadikan perbedaan biologis sebagai dasar diskriminasi. (Zulkaisi & Novianto, 2025) Relasi gender yang sehat ditandai oleh kesetaraan akses, partisipasi, dan kesempatan bagi setiap individu tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Relasi gender yang sehat berlandaskan kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan bebas dari diskriminasi. (Handayani, 2025)

Stereotip gender menghambat terwujudnya relasi yang sehat karena membatasi peran individu berdasarkan konstruksi sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Selain stereotip gender, *toxic masculinity* juga menghambat terwujudnya relasi yang sehat karena mendorong dominasi dan penekanan emosi pada laki-laki. Sebaliknya, *healthy masculinity* menekankan empati, tanggung jawab, komunikasi, dan pengelolaan emosi yang sehat. Karena itu, diperlukan upaya struktural, kultural, dan digital untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya relasi gender yang setara dan harmonis. (Wilujeng, 2013)

##### **1. Upaya Struktural: Membangun Kesadaran Kesetaraan melalui Pendidikan dan Kebijakan**

Kesetaraan gender menuntut adanya kesempatan, akses, partisipasi, dan kontrol yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan gender dengan mengatasi berbagai bentuk ketimpangan, seperti stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, ketimpangan beban kerja, dan kekerasan berbasis gender (Haslita et al., 2021). Transformasi menuju relasi gender yang sehat dan setara memerlukan upaya struktural yang melibatkan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan negara. Dalam keluarga, prinsip *gender partnership* dapat diterapkan melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang adil tanpa membedakan jenis kelamin. Diperlukan penguatan literasi gender, integrasi perspektif gender dalam pendidikan, serta kebijakan yang mendorong kesetaraan dan mencegah diskriminasi (Rahmawaty, 2015).

Ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan dalam lingkungan keluarga, terutama melalui pola pengasuhan yang mereproduksi bias gender melalui pembagian mainan, aktivitas, dan peran berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, boneka sering diasosiasikan dengan anak perempuan, sedangkan mobil-mobilan dengan anak laki-laki. Stereotip semacam ini berpotensi membatasi eksplorasi minat dan potensi anak pada masa penting pembentukan identitas, karakter, dan kepribadian. Menurut Santrock dan Berk, stimulasi pada masa kanak-kanak berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Stereotip gender dapat membatasi perkembangan anak, baik perempuan maupun laki-laki. Karena itu, literasi gender sejak dini penting untuk membangun kesadaran akan kesetaraan dan mencegah reproduksi bias gender dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut menjadi dasar terbentuknya relasi yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, keluarga berperan sebagai

agen sosialisasi utama melalui pola asuh, komunikasi, dan pembagian peran yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender (Rini et al., 2025).

Kesetaraan dan keadilan gender perlu diwujudkan di seluruh lapisan masyarakat karena berbagai bentuk ketidaksetaraan dan prasangka gender masih bertahan serta kerap direproduksi melalui proses sosialisasi dalam keluarga maupun pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai sarana transformasi sosial yang membentuk pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku individu (Tue et al., 2024). Upaya yang dapat dilakukan meliputi perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan, integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi, serta penguatan kapasitas pendidik melalui pembelajaran yang responsif gender. Pendidikan formal juga berperan dalam meluruskan miskonsepsi mengenai feminisme dengan menempatkannya sebagai upaya mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga stigma negatif yang berkontribusi terhadap munculnya *toxic masculinity* dapat dikurangi. Penanaman nilai kesetaraan gender melalui pendidikan mendorong terbentuknya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menolak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender guna membangun relasi gender yang lebih sehat dan setara (Utomo et al., 2025).

Penguatan kebijakan anti-diskriminasi dalam ruang sosial merupakan langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender di tengah masih bertahannya diskriminasi berbasis gender dan budaya patriarki dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki sebagai pihak yang dominan masih memengaruhi relasi gender serta membatasi akses terhadap pendidikan, ruang publik, dan posisi kepemimpinan. Dalam konteks miskonsepsi mengenai feminisme dan fenomena *toxic masculinity*, kebijakan anti-diskriminasi berperan menegaskan bahwa kesetaraan gender bertujuan menciptakan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Efektivitas kebijakan tersebut perlu didukung oleh peran lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas agar tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif serta relasi gender yang sehat dan setara. (Wijaya et al., 2025)

## 2. Upaya Kultural: Rekonstruksi Maskulinitas menuju *Healthy Masculinity* dan Pengurangan Stereotip Gender

Salah satu upaya kultural untuk mewujudkan relasi gender yang sehat adalah merekonstruksi pemahaman tentang maskulinitas. Konstruksi maskulinitas yang berorientasi pada dominasi turut mereproduksi *toxic masculinity* dan menghambat relasi yang setara. *Toxic masculinity* muncul sebagai tekanan sosial yang mendorong laki-laki untuk menekan ekspresi emosional dan terus menampilkan kekuatan. Maskulinitas yang inklusif bertumpu pada empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Relasi yang sehat dibangun melalui kepedulian, empati, dan tanggung jawab. Perspektif ini memperkuat pengembangan *healthy masculinity* sebagai dasar relasi gender yang lebih adil dan setara (Judiasih, 2022).

Standar maskulinitas yang mengaitkan kelelahan dengan kekuatan dan penolakan terhadap kerentanan emosional mendorong laki-laki menekan emosinya serta menghambat relasi yang setara. Ungkapan seperti “*laki-laki tidak boleh menangis*” atau “*laki-laki harus kuat*” telah membentuk ekspektasi sosial mengenai bagaimana laki-laki seharusnya mengekspresikan dirinya. Tekanan untuk menekan emosi dapat menghambat komunikasi dan pembentukan relasi yang setara. Sejalan dengan pemikiran Carol Gilligan yang menekankan kepedulian dan empati dalam hubungan sosial, normalisasi ekspresi emosional laki-laki diperlukan untuk memperkuat relasi yang lebih sehat dan empatik (Guk et al., 2026).

Pengurangan stereotip gender merupakan langkah penting dalam membangun relasi yang sehat dan setara. Stereotip gender mengonstruksikan laki-laki dan perempuan ke dalam karakter dan peran tertentu berdasarkan jenis kelamin, sehingga memengaruhi distribusi kesempatan, pembagian peran sosial, dan penilaian terhadap kompetensi individu. Akibatnya, kebebasan seseorang untuk mengembangkan potensi dan menentukan pilihan hidup sering kali dibatasi oleh ekspektasi sosial berbasis gender. Perspektif *Feminist Legal Theory* menunjukkan bahwa stereotip gender berperan dalam mempertahankan subordinasi dan ketidaksetaraan yang telah dinormalisasi secara sosial. Oleh karena itu, penilaian terhadap individu perlu didasarkan pada kapasitas dan pilihannya, bukan pada jenis kelamin yang dimiliki (Stewart et al., 2021).

### 3. Upaya Digital: Membangun Literasi Gender di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat mengenai isu gender, feminisme, dan maskulinitas. Penyebaran informasi yang cepat sering kali membuat feminisme dipahami secara parsial melalui potongan konten atau opini yang belum tentu sesuai dengan konsep dasarnya. Kondisi ini memunculkan berbagai miskonsepsi, seperti anggapan bahwa feminisme memusuhi laki-laki atau bertujuan menempatkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki (Marlina, 2018). Media sosial juga kerap memperkuat *toxic masculinity* melalui glorifikasi budaya *alpha male* dan anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi. Dalam perspektif *sociological jurisprudence* Eugen Ehrlich, media sosial sebagai bagian dari *living law* turut memengaruhi pola pikir masyarakat. Karena itu, upaya mengatasi miskonsepsi feminisme dan *toxic masculinity* tidak cukup dilakukan melalui hukum formal, tetapi juga memerlukan edukasi dan kampanye di ruang digital (Zarianto & Adityarani, 2025).

Dalam ruang digital, upaya membangun relasi gender yang lebih sehat dapat dilakukan melalui peningkatan literasi media sosial agar masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi mengenai feminisme dan maskulinitas. Literasi digital penting untuk mencegah penyebaran misinformasi yang sering menimbulkan anggapan bahwa feminisme merupakan gerakan yang memusuhi laki-laki atau bertujuan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi. Ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan konsep *healthy masculinity* yang menekankan empati, tanggung jawab, kemampuan mengelola emosi, dan penghormatan terhadap orang lain. Pengembangan ruang diskusi yang sehat dan inklusif diperlukan agar perdebatan mengenai isu gender tidak dipenuhi ujaran kebencian, stereotip, maupun *victim blaming*. Penyebaran konten yang lebih edukatif dan sensitif gender juga penting untuk mengurangi representasi yang memperkuat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Peran *influencer* dan figur publik dapat dioptimalkan dalam menyampaikan pesan mengenai kesetaraan gender karena memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung oleh pengawasan terhadap konten digital yang mengandung diskriminasi atau kebencian berbasis gender serta kampanye digital yang mendorong penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu (Muslimah et al., 2025).

Melalui langkah-langkah tersebut, ruang digital dapat menjadi sarana edukasi yang mendukung terbentuknya relasi gender yang lebih sehat, setara, dan inklusif. Media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pembentukan kesadaran sosial yang mendorong penghormatan terhadap kesetaraan gender. Peningkatan literasi digital, pelurusan miskonsepsi mengenai feminisme, penyebaran konsep *healthy masculinity*, serta pengurangan stereotip gender dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih inklusif, saling menghargai, dan bebas dari diskriminasi berbasis gender (Prihatin et al., 2025).

#### 4. Mewujudkan Relasi Gender yang Setara

Transformasi menuju relasi gender yang sehat dan setara merupakan tujuan akhir dari berbagai upaya kultural, struktural, dan digital dalam mengatasi miskonsepsi feminisme serta fenomena toxic masculinity. Kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi dasar diskriminasi, subordinasi, maupun pembatasan hak. Relasi yang setara ditandai oleh pemahaman yang tepat mengenai feminisme sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan, bukan sebagai bentuk dominasi salah satu gender. Melalui perubahan nilai sosial yang lebih inklusif, penguatan institusi yang responsif gender, serta pemanfaatan ruang digital yang edukatif, masyarakat dapat membangun relasi yang didasarkan pada penghormatan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Dalam relasi yang sehat, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara serta terbebas dari stereotip, diskriminasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Kondisi ini juga mendorong berkembangnya *healthy masculinity* yang menghargai empati, keterbukaan emosional, dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat relasi yang didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati. Pada akhirnya, relasi gender yang sehat dan setara akan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi berbasis gender (Abdillah et al., 2025).

#### KESIMPULAN

Feminisme merupakan gerakan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pemahaman yang keliru terhadap feminisme masih banyak ditemukan akibat pengaruh budaya patriarki, stereotip gender, rendahnya literasi gender, serta penyebaran informasi yang tidak utuh di media sosial. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan feminisme sering dipandang sebagai gerakan yang memusuhi laki-laki atau berupaya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan resistensi terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan memperburuk hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing pihak cenderung memandang satu sama lain sebagai ancaman, bukan sebagai mitra yang setara.

Miskonsepsi terhadap feminisme juga berkontribusi pada munculnya toxic masculinity, yaitu pola pikir yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, dominan, dan menekan ekspresi emosinya demi mempertahankan identitas maskulin. Akibatnya, relasi gender menjadi kurang harmonis, muncul sikap agresif, prasangka, dan penolakan terhadap pembagian peran yang lebih setara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi gender, pendidikan yang menanamkan nilai kesetaraan sejak dini, pengurangan stereotip gender, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi yang konstruktif. Dengan langkah-langkah tersebut, dapat terwujud relasi gender yang lebih sehat, inklusif, adil, dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, I., Arifin, M., Rodiyah, K., & Nisa, K. (2025). Rekonstruksi Konsep untuk Mengembalikan Esensi Kesetaraan Gender. *IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 83–99.
- Adhani, F. S., Oktaviani, M., & Tarma. (2026). Pengaruh Bias Gender dalam Komunikasi Keluarga terhadap Toxic Masculinity. *Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(4), 373–382.
- Adrian, K. (2024). *Toxic Masculinity, Ini yang Perlu Kamu Ketahui*. Alodokter.Com. <https://www.alodokter.com/toxic-masculinity-ini-yang-perlu-kamu-ketahui>

- Ageng, U. S. (2026). Miskonsepsi Feminisme di Kalangan Perempuan dalam Budaya Patriarki i Misunderstandings of Feminism Among Women in Patriarchal Societies. 3(8), 125–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19029204>
- Amin, M., & Nurkartiko, A “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi.” *Unes Law Review*, vol. 5, 2023, 4142.
- BENDAR, A. (2020). Feminisme Dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>
- Brahmana, K. M. B., Suryanto, S., & Suyanto, B. (2019). Gender role conflict model of pastors’ husbands at Batak Karo Protestant Church. *International Journal on Personal Relationships*, 13(2), 127–143.
- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society*, 19(6), 829–859.
- Fineman, M. A. (2010). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. In *Transcending the boundaries of law* (pp. 177-191). Routledge-Cavendish.
- Fitri, S., Luawo, M. I. R., & Puspasari, D. (2016). Gambaran Agresivitas Pada Remaja Laki-Laki Siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. *Insight : Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis. *Muwazah*, 6(1), 39.
- Gilligan, C. (1993). *In a different voice: Psychological theory and women’s development*. Harvard university press.
- Guk, J. R. G., Purba, D., & Mutiara, L. (2026). Toxic Masculinity dalam Konstruksi Sosial: Dekonstruksi Emosi Laki-Laki Dalam Perspektif Gender. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) TOXIC*, 5(1), 55–64.
- Handayani, W. (2025). Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 42–53.
- Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal culture and law enforcement in Indonesia: A normative juridical perspective. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(6). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987>.
- Harrington, C. (2021). What is “Toxic Masculinity” and Why Does it Matter? *Men and Masculinities*, 24(2), 345–352. <https://doi.org/10.1177/1097184X20943254>
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86.
- Hermawan, I., & Hidayah, N. (2023). Toxic masculinity dan tantangan kaum lelaki dalam masyarakat Indonesia modern. *Dimesia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(02), 171-182.
- Hidayah, N. (2025). Pemahaman Konseptual Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer Pada Qs Al Hujarat Ayat 13. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(5), 745-751.
- Humas, B. H. dan. (2024). *Kerjasama Kemen PPPA dan Asosiasi PPSW, Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Kelurahan Di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan*. Kemepppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/berita-pemerintahan/kerjasama-kemen-pppa-dan-asosiasi-ppsw--tingkatkan-kapasitas-kepemimpinan-perempuan-kelurahan-di-wilayah-jakarta-timur-dan-jakarta-selatan>
- Ilaa Thurfah Dhiyaa. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 212.

- Josselson, R. (2023). Developing a different voice: The life and work of Carol Gilligan. *Journal of Personality*, 91(1), 120–133. <https://doi.org/10.1111/jopy.12771>.
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia. *Acta Dijurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5, 284–302.
- Kartika, K., & Iqbal, M. (2023). Toxic masculinity di TikTok. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 48-62.
- Khidhir, M. (2025). Kontestasi Budaya Barat dan Dampaknya terhadap Perempuan : Analisis dari Perspektif Viktimologi. 03(01), 11–18.
- Kupers, T. A. (2005). Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in prison. *Journal of Clinical Psychology*, 61(6), 713–724.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>
- Luhulima, A. S., Kusumaningtyas, A. D., Rahman, A., Hamim, A., Hastawati, B., Lubis, D. B., ... & Basuki, Z. D. (2006). Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Marlina, I. (2018). Paham Gender Melalui Media Sosial. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi Dan Antropologi*, 2(2).
- Maulida, A., & Ahmadi, A. (2025). Perlawanan Laki-Laki Terhadap Toxic Masculinity Dalam Serial Sugar Daddy. *Jurnal Lazuardi*, 8(4).
- Muslimah, F., Dewi, A. A., Aziz, E. A., Kamila, R. S. T., Annanto, A. P., Ghudzamir, A. A., & Syaputra, M. H. D. (2025). *Kekerasan berbasis gender online (KBGO): Upaya pencegahan di lingkungan universitas*. Penerbit P4I.
- Novalina, M., Flegon, A. S., & Valentino, B. (2021). Kajian isu toxic masculinity di era digital dalam perspektif sosial dan teologi. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 8(1), 28-35.
- Octaviani, C. N., Prihantoro, E., Sariyati, & Banowo, E. (2022). Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia. *Broad Comm*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>
- Prasetyo, F. P. (2025). *Feminisme : Perjuangan Kesetaraan atau Kebencian Terhadap Laki-Laki?* Binus.Ac.Id. <https://binus.ac.id/character-building/2025/11/feminisme-perjuangan-kesetaraan-atau-kebencian-terhadap-laki-laki/>
- Prihatin, E., Kadarsah, D., & IZFS, R. D. (2025). *Kebijakan pendidikan nasional: Transformasi digital untuk sistem yang inklusif*. Indonesia Emas Group.
- Rahaayu, D. (2021). Perempuan dan Literasi Digital Antara Probel, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan (Rahayu, Ed.; 1st ed.). Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OXZQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA243&dq=miskonsepsi+feminisme&ots=pZGyDFhNIN&sig=HkY5Qwh8clYDk6nEy6DBVGpfQOU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=miskonsepsi%20feminisme&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OXZQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA243&dq=miskonsepsi+feminisme&ots=pZGyDFhNIN&sig=HkY5Qwh8clYDk6nEy6DBVGpfQOU&redir_esc=y#v=onepage&q=miskonsepsi%20feminisme&f=true)
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga. *Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1–34.
- Rendanody, A. (2019). Bias Feminisme: Isu LGBT, Seks Bebas dan Perubahan Norma Seksualitas. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.7>
- Rini, R. Y., Muslihatundinyah, Aqil, N., Savira, A. P. D., Octaviani, S., Millah, F., Muntaha, S., Maulana, A. F., & Azaima, A. I. (2025). Menumbuhkan Kesadaran Gender Sejak Dini pada Orang Tua di PAUD Insan Unggul Pulo Panjang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 189–199.

- Rizkiyah, E. L., & Trisakti, U. (2022). Kajian Feminisme dan Keadilan Sosial dalam Ideologi Pancasila. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* (2022), 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Shopiani, B. S., Wilodati., & Supriadi, U. “Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 2, 2021, 15.
- Smart, C. (2002). *Feminism and the Power of Law*. Routledge.
- Soleman, D. (2023). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179>
- Stewart, R., Wright, B., Smith, L., Roberts, S., & Russell, N. (2021). Gendered stereotypes and norms: A systematic review of interventions designed to shift attitudes and behaviour. *Heliyon*, 7(4), Article e06660. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06660>
- Susanti, V., Rosyidah, I., & Sahetapy, E. L. (2024). Dynamics of Culture and Media Power: Analysis of Misogyny in Online News in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(2), 168–179. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.43702>
- Syafi'i, I. (2023). Miskonsepsi Warganet Terhadap Isu Feminisme Dalam Unggahan Twitter @Magdalena. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 16(2), 239–250.
- Syayekti, E. I. D. (2023). Komunikasi di media sosial: Perspektif kesetaraan gender. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(2), 141-154.
- Tong, R., & Botts, T. (2018). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. New York: Routledge.
- Torres, V., & Garcia, Y. (2019). In a different voice: Psychological theory and women's development by Carol Gilligan. *Journal of college student development*, 60(3), 372-375.
- Tue, F., Melo, R. H., Samatowa, L., & Asrul. (2024). Peran Pendidikan dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan*, 12(3).
- Utomo, D. B., Mufariqah, S., & Maftucha. (2025). Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosialis Sebagai Media Penguatan Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Dimas. *JSGA: Journal Studi Gender Dan Anak*, 12(02), 1–12.
- Wibowo, B. A. (2022). Feminisme Indonesia. *KARMAWIBANGGA: Historical Studies Journal*. (4 (2)), 125–136. <https://doi.org/10.31316/fkip.v4i2.4673>
- Widodo, W, dkk “Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi Nusantara*, vol. 3, 2021, p. 46.
- Wijaya, M., Zahra, F. A., Amini, S. F., Nabilla, A., & Umniyah, U. Z. (2025). Kesetaraan Dan Kebebasan Perempuan: Strategi Melawan Diskriminasi Serta Ancaman Patriarki. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika*, 18(2).
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Jurisdische : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219.
- Zidan, M. Y., Wicaksono, M. S. A., & Indriyany, I. A. (2026). Miskonsepsi Feminisme di Kalangan Perempuan dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(8), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.19029204>
- Zulkaisi, M. Z., & Novianto, F. A. (2025). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Humanisme: Membangun Relasi Laki-Laki dan Perempuan yang Adil dan Harmonis. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 21(2), 235–246. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i2.47216>